

ADVOKASI LEMBAGA SIGAB DALAM PERINTISAN DESA INKLUSI

DI SENDANGADI, SLEMAN, YOGYAKARTA



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Dzurrotun Afifah Fauziah
NIM 13230004

Dosen Pembimbing:

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP 19830811 201101 2 010

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor : B-1210/Un.102/DD/PP.05.3/ 05 /2017

Tugas Akhir dengan Judul : **ADVOKASI LEMBAGA SIGAB DALAM PERINTISAN DESA INKLUSI DI SENDANGADI, SLEMAN, YOGYAKARTA.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dzurrotun Afifah Fauziah
Nomor Induk Mahasiswa : 13230004
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si.
NIP. 19830811 201101 2 010

Penguji II

Drs. H. Afif Rifa'i, M.Si.
NIP. 19580807 1985031 003

Penguji III

Suyanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660531 198801 1 001

Yogyakarta, 6 Juni 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

DEKAN



Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalammu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Dzurrotun Afifah Fauziah
NIM : 13230004
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul Skripsi : Advokasi Lembaga Sigab Dalam Perintisan Desa Inklusi di Sendangadi, Sleman, Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Mei 2017

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi PMI,

Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si.
NIP: 19830811 201101 2 010

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si
NIP: 19810438 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dzurrotun Afifah Fauziah
Nim : 13230004
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Advokasi Lembaga Sigab Dalam Perintisan Desa Inklusi di Sendangadi, Sleman, Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 5 Juni 2017

Yang menyatakan,



Dzurrotun Afifah Fauziah
NIM.13230004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini Kupersembahkan Untuk;

Kedua orangtua ibu dan bapak dirumah tercinta yang telah membesarkan penuh dengan kesabaran dan mendidik hingga sekarang.

Adik-adikku tercinta dek Lutfiah dan dek Jihan penyemangatku.

Ibu Nyai Durroh Nafisah yang telah membimbingku dengan segala kasih sayang.

Lembaga SIGAB dan Desa Sendangadi yang telah bersedia membantu dalam proses pembuatan skripsi.

Semua guru-guruku yang telah mengajarkan cara berinteraksi dengan dunia.

Almamaterku tercinta Yayasan Ali Maksum Komplek Hindun Anisah.

Sahabat-sahabatku jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sukga.

Sahabat-sahabatku semua yang ada di Komplek Hindun Anisah yang selalu memberi support. Terkhusus anak kamar tercinta.

Sahabat-sahabatku mendes Anisah, Fitri 'Aini, Riska.y, Herra, Fitriyana yang selalu memberi motivasi dan masukan setiap hari tanpa lelah.

Temen-temen kos Flamboyan Izza, Peba, Sulis dkk yang sudah banyak membantu.

Motto

Ojo kagetan lan ojo gumunan

(Kh. Ali Maksum)¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Ibu Durroh Nafisah Ali, Pengasuh Komplek HindunAnisah PP. Ali Maksum.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah dengan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak terhadap penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ADVOKASI LEMBAGA SIGAB DALAM PERINTISAN DESA INKLUSI DI SENDANGADI, SLEMAN, YOGYAKARTA”**. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos, M.Si, selaku ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam beserta jajarannya.
4. Bapak Drs. H. Moh Abu Suhud, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi.
5. Ibu Siti Aminah S.Sos.I.,M.Si. selaku Pembimbing Skripsi, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan mengarahkan penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu dan bapak tercinta yang telah merawat, mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran hingga penulis bisa meraih gelar sarjana.
8. Teman-teman seperjuangan tercinta PMI'13 yang selalu memotivasi dan membantu penulis selama ini.
9. Ibunda nyai Hj. Durroh Nafisah selaku pengasuh Komplek Hindun Anisah.
10. Sahabat-sahabat penulis di Komplek Hindun Anisah yang selalu memberi masukan dan motivasi.
11. Sahabat-sahabatku mendes sholehah Anisah, Fitri 'Aini, Riska.y, Herra, Fitriyana yang selalu memberi motivasi dan masukan setiap hari tanpa lelah.
12. Temen-temen kos Flamboyan Izza, Pebi, Sulis dkk yang sudah banyak membantu.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritikan dan saran kepada penulis sebagai perbaikan skripsi ini dengan senang hati penulis terima. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 24 Mei 2017

Penyusun

Dzurrotun Afifah Fauziah
NIM: 13230004

ABSTRAK

Dzurrotun Afifah Fauziah, tahun 2017, judul Skripsi “*Advokasi Lembaga Sigab Dalam Perintisan Desa Inklusi di Sendangadi, Sleman, Yogyakarta*”: Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Upaya advokasi difabel sebagai wujud keberpihakan kepada para penyandang difabel. Advokasi difabel dalam perintisan Desa Inklusi ini yang akan diteliti oleh penulis serta hambatan dan tantangannya dalam advokasi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya advokasi lembaga SIGAB dalam mewujudkan Desa Inklusi dalam program RINDI dan mengetahui apasaja hambatan-hambatan yang dialami selama menjadikan Desa sebagai Desa Inklusi. Melalui lembaga SIGAB yang memiliki program Rintisan Desa Inklusi (RINDI).

Jenis Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik penarikan informan menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua data dilihat validitas datanya dan dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya advokasi SIGAB mewujudkan Desa Inklusi melalui program RINDI yang dilakukan oleh lembaga SIGAB di Desa Sendangadi, berawal dari pendataan difabel Desa, membangun perspektif difabel kepada tokoh masyarakat dan masyarakat umum, pembentukan organisasi difabel Desa, penyelenggaraan layanan aksesibel difabel, difabel mulai terlibat dalam pengambilan keputusan konsep pembangunan masyarakat, adanya tanggungjawab masyarakat turut melindungi hak difabel, menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder hingga monitoring dan evaluasi. Adapun advokasi ini banyak pula hambatan dan tantangan yang dihadapi dilapangan seperti kurangnya dukungan masyarakat secara maksimal, mobilisasi difabel yang mengalami hambatan alat bantu, sedang tantangannya yaitu kurangnya memaksimalkan sistem informasi Desa yang karena kurang update, lemahnya kebijakan PerDes untuk penyandang difabel, perbaikan ekonomi masyarakat terkhusus para difabel.

Kunci: Advokasi, Difabel, Desa Inklusi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Kerangka Teori.....	12
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Pembahasan	30

BAB II: PROFIL LEMBAGA SIGAB30

A. Letak Geografis Lembaga SIGAB	30
B. Sejarah Lembaga SIGAB	30
C. Visi dan Misi	33
D. Mandat Organisasi	34
E. Nilai-nilai dalam Organisasi	34
F. Strategi Internal dan Eksternal	35
G. Program yang Telah dilakukan	38
H. Struktur Kepengurusan	45
I. Struktur Penerimaan SIGAB	46
J. Alokasi Belanja SIGAB	47
K. Kerjasama Lembaga SIGAB	48
L. SIGAB Rintisan Desa Inklusi (RINDI)	48

BAB III: UPAYA ADVOKASI LEMBAGA SIGAB DALAM MEWUJUDKAN RINTISAN DESA INKLUSI (RINDI) DI DESA SENDANGADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA.....51

A. Gagasan Inklusi dimulai dari Desa	52
B. Upaya Advokasi dalam Mewujudkan Desa Inklusi	57
1. Pendataan Informasi Desa.....	58
2. Membangun Perspektif Difabel	59
3. Pembentukan Kelompok Organisasi Difabel Desa	61
4. Penyelenggaraan Layanan Ramah Difabel Desa	62
5. Difabel Terlibat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan	64
6. Menjalin Relasi Kerjasama dengan Stakeholder.....	65
7. Memonitoring dan mengevaluasi distribusi pelayanan.....	66
8. Adanya tanggung jawab masyarakat untuk turut melindungi hak difabel.....	67

C. Hambatan dan Tantangan Perintisan Desa Inklusi.....	68
1. Hambatan	68
2. Tantangan.....	71
D. Analisis Hasil Penelitian	74
BAB IV: PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Dewan pembimbing.....	45
Tabel 2 Daftar Pengurus Harian dan Staf	46
Tabel 3 penerimaan Dana SIGAB.....	47
Tabel 4 Alokasi belanja SIGAB.....	47
Tabel 5 Data Difabel Desa Sendangadi	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 SIGAB memiliki gambaran Desa Inklusi	55
Gambar 2 Launching dan Diskusi SID	59
Gambar 3 Sosialisasi Perspektif Difabel.....	61
Gambar 4 Tampilan Depan dan Samping Ruang Publik	63
Gambar 5 Pengambilan Keputusan melibatkan Difabel.....	66



BAB 1

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Penegasan judul ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman tentang penelitian dengan judul “*Advokasi Lembaga Sigab Dalam Perintisan Desa Inklusi di Sendangadi, Sleman, Yogyakarta*”, maka penting adanya penjabaran dan penjelasan terkait istilah tema penelitian tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Advokasi

Pengertian Advokasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah pembelaan, *penggagas berdirinya lembaga bantuan hukum ini kembali menekuni dunia*.¹ Sedang menurut Harlen Sinaga, pengertian advokat adalah seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain dihadapan pengadilan. Seseorang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan dihadapan pengadilan.² Jadi advokasi adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum dengan pembelaan, memberikan nasihat dan bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan undang-undang.

¹Arti Advokasi, <http://kbbi.web.id/advokasi>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017.

²Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 2.

2. SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel)

Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) adalah organisasi non pemerintah yang bersifat independen, nirlaba, dan nonpartisan. SIGAB didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2003. Organisasi yang mempunyai motto “Bersama Menuju Masyarakat Inklusi” ini mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif.

SIGAB didirikan karena sampai saat ini kehidupan warga difabel masih dimarginalkan, baik secara struktural maupun kultural. Hak-hak warga difabel seperti hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi sampai pada penggunaan fasilitas publik tidak pernah diterima secara layak. Dengan kata lain, telah terjadi diskriminasi terhadap warga difabel.³ Oleh karena itu SIGAB hadir untuk menjadi jembatan penghubung aspirasi-aspirasi para kaum difabel dan membela, memperjuangkan hak-hak difabel agar tidak ada terjadi diskriminasi dan marginalisasi dan dalam rangka membangun awarness dan mainstreaming difabel.

3. Desa Inklusi

Pembangunan desa yang mendukung kaum difabel ikut serta dalam pembangunan Desa. Desa yang menghargai perbedaan sehingga semua warga merasa memiliki, keterbukaan bagi semua untuk menyetarakan hak-hak yang harusnya diperoleh oleh masyarakat difabel, dapat berpartisipasi

³Profil Lembaga SIGAB, <http://sigab.or.id/id/article/profil-lembaga-sigab>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

dan menikmati proses dan hasil pembangunan, inilah program yang dinamakan rintisan Desa inklusi.⁴ Jadi dengan lingkungan masyarakat yang terbuka universal untuk semua masyarakat berhak mendapatkan hak yang mereka miliki tanpa melihat ras, status sosial, ekonomi, latar belakang, pendidikan, profesi, tradisi, adat istiadat, dan mengikut sertakan perbedaan.

Jadi maksud dari judul “*Advokasi Lembaga Sigab Dalam Perintisan Desa Inklusi di Sendangadi, Sleman, Yogyakarta*” adalah, sebuah penelitian yang mendeskripsikan tentang bagaimana beberapa upaya advokasi dan hambatan-hambatan yang dilakukan lembaga SIGAB dalam mewujudkan Desa Inklusi di Sendangadi, Sleman, Yogyakarta.

B. LATAR BELAKANG

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁵ Dewasa ini Desa sudah mulai banyak mengalami kemajuan dari mulai infrastruktur bangunan, jalanan hingga pendidikan. Setelah adanya UU Desa yang telah di-sah-kan pada tahun 2014 lalu, dan sudah tertera pula dalam PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diambil dari alokasi APBN.

⁴Desa Inklusi, <https://www.sigab.or.id/id/article/desa-inklusi-dan-peluangnya-dalam-implementasi-undang-undang-desa>, diakses pada tanggal 28 Februari 2017.

⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1.

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Sedangkan realisasinya di daerah Desa masih ada beberapa yang belum terealisasi. Masih banyak di pemukiman terpencil yang jalannya masih belum ada perbaikan. Pendidikan masih jauh dari pemukiman penduduk, sarana prasarana kesehatan juga masih butuh menempuh berkilo-kilo meter untuk menjangkaunya.

Pemerintah sekarang sudah banyak menyediakan sarana publik untuk para difabel. Baik di ruang publik ataupun kantor-kantor untuk aksesibilitas keseharian. Seperti yang sedang dalam proses saat ini yaitu sarana publik untuk pejalan kaki di ruas sepanjang jalan Malioboro dan di lapangan daerah atau alun-alun juga sudah tersedia akses untuk para disabel khusus para pejalan kaki. Banyak pula sekarang didalam instansi pemerintahan mulai memperhatikan sarana pra sarana khusus disabilitas untuk mengakses ruang publik. Dengan memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat difabel dalam mengakses pelayanan-pelayanan publik yang ada berarti memperkecil kesenjangan angka partisipasi pelayanan publik bagi masyarakat normal dan masyarakat difabel. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 19 ayat 1 dan 2.

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷

Adanya diskriminasi antar kaum difabel atau disabel salah satunya tidak efektifnya program pendidikan dan model pembelajaran di sekolah. Sementara model pendidikan saat ini masih didominasi oleh model pendidikan konvensional yang cenderung doktriner, yang cenderung mengakibatkan kurangnya sikap toleransi dan kerukunan antar sesama manusia.⁸

Selama dekade terakhir ini, di Indonesia marak terjadi konflik kekerasan, konflik sosial dan pelecehan seksual. Hal tersebut mengakibatkan rapuhnya relasi antar agama dan antar etnik yang telah dibangun sejak lama. Tak jarang kaum disabel sering menjadi korban konflik kekerasan ataupun seksual yang kerap terjadi. Maka dari itu tidak terlalu berlebihan jika ada yang memiliki rasa kekhawatiran ketegangan yang muncul saat ini dikalangan masyarakat terkhusus yang memiliki keluarga penyandang difabel.⁹

Meskipun pemerintah telah berusaha menciptakan demokratisasi mulai dari pusat pemerintahan hingga sampai pada tingkat bawah, dalam kenyataannya hal tersebut masih sangat jauh dengan apa yang diharapkan. Dalam banyak kasus, ternyata keberhasilan pemerintah dalam membangun struktur politik masih sangat belum berfungsi sebagaimana fungsi semestinya. Ditingkat pusat hingga kabupaten kita memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berada di posisi wewenang tertinggi sebagai perwujudan dari

⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Difabel.

⁸Imam Rosyidi, *Pendidikan Berparadigma Inklusi*, (UIN Malang Press, 2009), hlm.vii.

⁹*Ibid.*, hlm. 37.

kedaulatan rakyat atas negeri ini. Tapi apa yang telah didapat masyarakat belum sepenuhnya mereka miliki. Maka tak heran jika banyak masyarakat berbondong-bondong mengajukan permasalahan yang dihadapinya justru kepada DPR Pusat. Maka tidak mengherankan apabila masyarakat menilai DPR kurang mempunyai tanggung jawab moral terhadap rakyat yang diwakilinya.¹⁰

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.¹¹ Dengan adanya undang-undang yang baru disahkan ini diharapkan menjadi tonggak perubahan dan pemenuhan hak para disabilitas UU RI nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.¹² Namun dengan adanya undang-undang baru yang mengatur tentang penyandang disabilitas ini belum terlalu berpengaruh dampaknya bagi para disabilitas karena baru disahkan dalam beberapa bulan lalu.¹³ Realitanya masih banyak juga masyarakat difabel yang belum terlalu

¹⁰Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Pustakan Pelajar Offset, cetakan vi, April 2010), hlm.74.

¹¹Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Difabel.

¹²*Ibid*, hlm. 2.

¹³Wawancara dengan Irma, Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 30 November 2016.

ikut serta dalam berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan desa di lingkungan mereka.¹⁴

Di Yogyakarta sendiri terdapat suatu lembaga yang mengapresiasi warga difabel, organisasi ini memiliki motto “*Bersama Menuju Masyarakat Inklusi*”. Dengan adanya lembaga yang memberikan wadah bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi disabilitas yang kreatif dan inovatif dalam bermasyarakat ataupun berkarya, yaitu Lembaga Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB).

Salah satu program yang sedang digarap sejak tahun lalu yaitu program RINTisan Desa Inklusi (RINDI). Tujuan program ini adalah menjadikan masyarakat yang inklusi dan desa inklusi yang terbuka universal untuk siapapun tanpa memandang keturunan, ras, status sosial-ekonomi, pendidikan, latar belakang, adat istiadat. Program ini telah diresmikan pada bulan Juni 2015 rintisan Desa Inklusi ini telah berjalan di 8 desa yaitu di Kabupaten Sleman sendiri ada dua yaitu Desa Sendangtirto dan Sendangadi, sedang di Kabupaten Kulonprogo ada 6 desa Ngentakrejo, Wahyuuharjo, Gulurejo, Bumirejo, Jatirejo dan Sidorejo. Bentuk perintisannya sendiri yaitu ada program dampingan untuk pembentukan kelompok difabel desa.¹⁵ Karena perbedaan bukanlah suatu hal yang harus kita jauhi melainkan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari mereka dan menjadikan masyarakat inklusi yang tidak

¹⁴Wawancara dengan Prima, Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 30 November 2016.

¹⁵Wawancara dengan Aji, Kontributor Website Solider SIGAB, 15 Desember 2016.

saling membedakan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya pendampingan dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami selama masa mewujudkan perintisan Desa Inklusi sebagai salah satu program lembaga SIGAB yaitu progam RINTisan Desa Inklusi (RINDI).

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dengan judul “*Advokasi Sigab Dalam Perintisan Desa Inklusi di Sendangadi, Sleman, Yogyakarta*”, berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana upaya advokasi pendampingan lembaga SIGAB dalam perintisan desa inklusi di Desa Sendangadi?
2. Apasaja hambatan-hambatan advokasi pendampingan lembaga SIGAB dalam upaya perintisan desa inklusi di Desa Sendangadi?

D. TUJUAN PENELITIAN

Di dalam setiap penelitian atau karya ilmiah, tentu saja memiliki tujuan yang mendasari dari penulisan penelitian tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang mendasari penelitian ini penting untuk dijawab:

1. Untuk mendeskripsikan upaya advokasi pendampingan lembaga SIGAB dalam perintisan desa inklusi di desa Sendangadi.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja hambatan-hambatan advokasi pendampingan lembaga SIGAB dalam upaya perintisan desa inklusi di desa Sendangadi.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan dalam penelitian sosial pada pengembangan ilmu sosial secara umum dan secara khusus bagi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis yaitu penelitian yang berkaitan dengan advokasi lembaga SIGAB dalam mewujudkan Desa Inklusi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai sumbangsih terhadap dunia perpustakaan, khususnya dalam tema advokasi lembaga SIGAB dalam mewujudkan Desa Inklusi.
- b. Memberikan kontribusi positif bagi lembaga SIGAB terkhusus kepada masyarakat Desa Inklusi Sendangadi, dalam mewujudkan Desa Inklusi.

F. KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka, peneliti mengacu pada skripsi maupun jurnal yang membahas tentang advokasi Desa Inklusi. Hal ini di tunjukkan untuk mengetahui tentang kelayakan penelitian ini. Apakah sudah pernah dikaji atau belum, serta manambah data-data terkait penelitian tentang advokasi Desa Inklusi.

Pertama, Ria Suraiya “*Pola Pelaksanaan Advokasi Oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Masalah*

Perkosaan Anak Dalam Keluarga”. Skripsi ini memaparkan tentang perkosaan anak dalam keluarga disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun seiring dengan perputaran zaman, muncullah lembaga-lembaga advokasi masyarakat yang mulai menangani kasus korban kekerasan dalam keluarga. Adapun pembahasan mengenai lembaga advokasi masyarakat dan kasus perkosaan anak dalam keluarga untuk mengetahui pola pelaksanaan advokasi terhadap masalah perkosaan anak dalam keluarga.¹⁶ Persamaan yang terdapat antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang advokasi pemberdayaan, namun yang menjadi perbedaan adalah bahwasanya penelitian saudara Ria Suraya mengkaji masalah tentang advokasi pemerkosaan anak dalam keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang advokasi Desa Inklusi dan hambatan upaya advokasi Desa.

Kedua, Muhammad Iqbal Hermawan “*Kinerja Pekerja Sosial Dalam Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Skripsi ini mempunyai fokus rumusan masalah mengenai bagaimana kinerja pekerja sosial sebagai pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam melaksanakan advokasi anak yang berhadapan dengan hukum di YLPA DIY.¹⁷ Persamaan yang terdapat antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang advokasi, namun yang menjadi perbedaan adalah

¹⁶Ria Suraiya, “*Pola Pelaksanaan Advokasi Oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Masalah Perkosaan Anak Dalam Keluarga*”, skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 2016, hlm. ix.

¹⁷Muhammad Iqbal Hermawan, “*Kinerja Pekerja Sosial Dalam Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta*”, skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 2016, hlm. x.

bahwasanya penelitian saudara Iqbal Hermawan mengkaji masalah tentang advokasi anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang advokasi Desa Inklusi dan hambatan upaya advokasi Desa.

Ketiga, Ayu Fitriani Cahyani “*Advokasi Pekerja Sosial dalam Pilot Project Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta*”. Skripsi ini berfokus pada bagaimana peran dan proses pekerja sosial melaksanakan advokasi dalam *Pilot Project* rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dan bagaimana hambatan dan manfaat pekerja sosial melaksanakan advokasi dalam *Pilot Project* rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta.¹⁸

Persamaan yang terdapat antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang advokasi, namun yang menjadi perbedaan adalah bahwasanya penelitian saudara Ayu Fitriani mengkaji masalah tentang advokasi korban penyalahgunaan narkotika anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang advokasi Desa Inklusi dan hambatan upaya advokasi Desa di masyarakat.

Keempat, Ratri Ayu Maulidia “*Advokasi Terhadap Difabel Kekerasan Seksual oleh Lembaga SIGAB*”. Skripsi ini mengetahui tentang advokasi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh para difabel yang didampingi oleh lembaga Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB). Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, didapatkan data bahwa SIGAB melakukan pendampingan sosial, pendampingan kesehatan,

¹⁸Ayu Fitriani Cahyani, “*Advokasi Pekerja Sosial dalam Pilot Project Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta*”, skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 2015, hlm. ix.

pendampingan ekonomi, dan pendampingan hukum.¹⁹ Persamaan yang terdapat antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang advokasi yang ada di Lembaga SIGAB, namun yang menjadi perbedaan adalah bahwasanya penelitian saudara Ratri Ayu mengkaji masalah tentang advokasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh SIGAB, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang advokasi Desa Inklusi dan hambatan upaya advokasi Desa dalam program RINDI yang dilakukan oleh SIGAB.

Kelima, Yuli Riski Amalia dalam *“Peran Guru Pendamping ABK dalam Program Pendidikan Inklusi (Studi pada Guru Pendamping ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di SD Budi Mulia Dua Setruran Kabupaten Sleman Provinsi D .I. Yogyakarta)*. Skripsi ini memaparkan tentang mengetahui kedudukan dari adanya guru pendamping ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di SD Budi Mulia Dua dan metode yang digunakannya dalam proses pendampingan kegiatan belajar mengajar terhadap siswa *difabel*.²⁰ Persamaan yang terdapat antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti tentang Inklusi, namun yang menjadi perbedaan adalah bahwasanya penelitian saudara Yuli Riski mengkaji masalah tentang ABK program pendidikan inklusi, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang advokasi Desa Inklusi dan hambatan upaya advokasi Desa di masyarakat.

¹⁹ Ratri Ayu Maulidia *“Advokasi Terhadap Difabel Kekerasan Seksual oleh Lembaga SIGAB”*, skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 2016, hlm. vii.

²⁰ Yuli Riski Amalia *“Peran Guru Pendamping ABK dal Program Pendidikan Inklusi (Studi pada Guru Pendamping ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di SD Budi Mulia Dua Setruran Kabupaten Sleman Provinsi D .I. Yogyakarta)”*. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm, viii.

G. KERANGKA TEORI

1. Advokasi

Istilah advokasi (*to advocate*) bukan hanya berarti membela (*to defend*) melainkan mengemukakan atau memajukan (*to promote*) menciptakan (*to Create*) dan melakukan perubahan (*to change*) dalam bahasa Inggris. Konteks pekerja sosial dalam melakukan proses advokasi menurut Jim Ife peranan pekerja sosial dalam mewakili kepentingan-kepentingan klien merupakan *lobbying* dengan para politisi atau pemegang kekuasaan (Jaksa, hakim, Saksi dan lain-lain).²¹ Dengan kata lain Advokasi adalah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas persyaratan dari sejak tipe institusi.²² Kebijakan advokasi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kemahiran menganalisis kebijakan dalam memilih isu, strategi *stakeholder*, dan kejelasan sasaran atau audien advokasi. Sedang advokasi yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut berorientasi pada hasil, terencana, kreatif, relevan dengan kebutuhan kolektif, kolaboratif, strategis, berpengaruh dan fokus pada satu isu tertentu.²³

Adapun beberapa tujuan advokasi menurut Sigit Pamungkas adalah untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan dari pemerintah,

²¹ Jim Ife dan Frank Tesorio, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 595-597.

²² Panggabean, *Managemen Advokasi*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2012). hlm, 5.

²³ Edi Suharto, "*Analisis Kebijakan Publik*", hlm. 125.

institusi, atau organisasi.²⁴ Adapun secara umum tujuan advokasi menurut Sampark ada beberapa tujuan yaitu:

- a. Menarik perhatian para pembuat kebijakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi kelompok marjinal.
- b. Memperngaruhi proses pembuatan dan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada.
- c. Memberi pemahaman kepada publik tentang detail dari berbagai kebijakan, sistem-sistem yang ada serta skema-skema kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan ketrampilan dan cara pandang individu maupun kelompok-kelompok sosial agar kebijakan bisa diimplementasikan secara baik dan benar.
- e. Menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat.
- f. Mendorong tumbuhnya aktivis-aktivis keadilan sosial yang muncul dari kekuatan masyarakat sipil.²⁵

Beberapa prinsip-prinsip Advokasi dengan tujuan advokasi adalah melakukan perubahan, oleh karena itu adapun beberapa prinsip advokasi dibawah ini yang bisa dijadikan pedoman dalam merancang advokasi yang sukses;²⁶

²⁴*Ibid.*, hlm. 5.

²⁵Sigit Pamungkas, *Advokasi Berbasis Jaringan*, (Yogyakarta: Gd PAU UGM Lt. 3 Sayap Timur, Agustus 2010), hlm. 12.

²⁶*Ibid*, hlm. 169-172.

- a. Realistis. Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur.
- b. Sistematis. Kemas informasi semenarik mungkin. Libatkan media secara efektif, proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mengidentifikasi isu strategis, membangun opini dan mendukungnya secara fakta, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan, dan memantau menilai gerakan.
- c. Taktis. Pekerja sosial harus bisa membangun koalisi atau kerjasama sekutu dengan pihak lain. Sekutu biasanya dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya.
- d. Strategis. Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan atau power. Kekuasaan intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan.
- e. Berani. Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Jadikan isu dan strategis yang telah dilakukan sebagai motor gerakan dan tetaplah berpijak pada agenda bersama.

2. Upaya Advokasi

Dalam konteks pemberdayaan, advokasi tidak hanya membela atau mendampingi orang miskin, melainkan bersama-sama dengan mereka melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis. Advokasi sosial dapat dikelompokkan dalam dua jenis: 'advokasi kasus' (*case*

advokasu), dan ‘advokasi kelas’ (*class advokasy*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:²⁷

- a. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya.
- b. Advokasi kelas adalah kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional.

Advokasi yang dilakukan pekerja sosial dalam pemberdayaan dilakukan dengan membantu klien mengakses sumber-sumber, mengkoordinasikan distribusi pelayanan sosial atau merancang kembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial, merupakan sebagian dari fungsi manajemen sumber. Oleh karena itu strategi atau upaya advokasi memfokuskan kedalam tiga *setting* yaitu aras mikro, mezzo dan makro seperti yang dijelaskan di bawah ini:²⁸

1. Aras Mikro

Pada aras mikro, peran utama Pekerja Sosial adalah sebagai broker (pialang) sosial yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang

²⁷Edi Suharto, *Pekerja Sosial...*, hlm. 165-166.

²⁸*Ibid*, hlm. 166-169.

tersedia di lingkungan sekitar. Sebagai pialang sosial, teknik utama yang dilakukan adalah manajemen kasus (*case management*) yang mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh berbagai penyedia. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:

- a. Melakukan asesmen terhadap situasi dan kebutuhan khusus klien
- b. Memfasilitasi pilihan-pilihan klien dengan berbagai informasi dan sumber alternatif
- c. Membangun kontrak antara klien dan lembaga-lembaga pelayanan sosial
- d. Menghimpun informasi mengenai berbagai jenis dan lokasi pelayanan sosial, parameter pelayanan, dan kriteria kelayakan
- e. Mempelajari kebijakan-kebijakan, syarat-syarat, prosedur dan proses pemanfaatan sumber-sumber kemasyarakatan
- f. Menjalin relasi kerjasama dengan berbagai stakeholder
- g. Memonitoring dan mengevaluasi distribusi pelayanan.²⁹

2. Aras Mezzo

Sebagai mediator, Pekerja Sosial mewakili dan mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi bersama, merumuskan tujuan, mendiskusikan solusi-solusi potensial, memobilisasi sumber, menerapkan, memonitoring dan mengevaluasi rencana aksi. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai mediator diantaranya:

²⁹*Ibid*, hlm. 167-168.

- a. Menelisik pandangan dan kepentingan-kepentingan khusus dari masing-masing pihak
- b. Menggali kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengalami konflik
- c. Membantu pihak-pihak agar dapat bekerja sama dengan berbagai faksi atau kelompok
- d. Mendefinisikan dan menangani hambatan komunikasi
- e. Mengidentifikasi berbagai manfaat yang ditimbulkan dari sebuah koalisis atau kerjasama
- f. Memfasilitasi pertukaran informasi secara terbuka diantara berbagai pihak yang terlibat
- g. Bersikap netral, tidak memihak, dan pada saat yang sama tetap percaya diri, yakin dan optimis terhadap manfaat kerjasama dan perdamaian.³⁰

3. Aras Makro

Peran Pekerja Sosial pada ttataran makro adalah menjadi aktivis dan analis kebijakan. Sebagai aktivis, Pekerja Sosial terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat. Meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakadilan, memobilisasi sumber untuk mengubah kondidi-kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan lobby dan negoisasi agar tercapai perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan *class action*. Analisis kebijakan dapat dilakukan

³⁰*Ibid*, hlm. 168.

melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan prospektif, retrospektif dan integratif.

- a. Pendekatan prospektif adalah analisis dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat sebelum kebijakan diterapkan. Mengajukan opsi kebijakan baru terhadap pemerintah untuk merespon kondisi atau masalah sosial yang dihadapi masyarakat, karena belum ada kebijakan untuk itu.
- b. Pendekatan retrospektif. Analisis dilakukan terhadap kebijakan yang sudah ada, artinya menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan akibat diterapkannya sebuah kebijakan.
- c. Pendekatan integratif. Perpaduan dari kedua pendekatan diatas. Analisis dilakukan baik sebelum maupun sesudah kebijakan diterapkan.³¹

3. Hambatan-hambatan Advokasi

Dalam pembuatan suatu program pastilah kita menemui hambatan-hambatan ataupun tantangan masalah didalamnya. Dalam hal ini menurut Edi Suharto ketika melakukan advokasi pekerja sosial ada berbagai ragam tantangan sebagai berikut:

- a. Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi. suatu perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. kapasitas perseorangan dan mengelola

³¹*Ibid*, hlm. 169.

sumber daya guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dalam kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi mereka sendiri demi mencapai hasil yang lebih baik.

- b. Memobilisasi sumberdaya setempat. Merupakan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.
- c. Memecahkan masalah sosial. Suatu perbedaan antara apa yang diharapkan dan kenyataan yang terjadi atau terjadinya kesenjangan antara keadaan atau situasi yang ada dengan situasi yang menurut banyak orang yang seharusnya terjadi. Oleh karena itu sebagai pendamping sosial harus bisa menyelesaikan masalah dengan metode yang ada.
- d. Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan. Mampu mengakomodir kebutuhan yang beragam merencanakan membuat suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan membuka akses yang sebesar-besarnya dengan keterbatasan untuk bisa mendapat haknya secara legal dan layak.

- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.³² Pengorganisian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya.
- f. Monitoring dan Evaluasi program. monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Sedang evaluasi program adalah mengukur berhasil tidaknya suatu program yang dilaksanakan, apa sebabnya berhasil dan apa sebabnya gagal, serta bagaimana tindak lanjutnya. Kegiatan evaluasi senantiasa didasarkan atas hasil dari monitoring.³³ Sedangkan tujuan adanya monitoring adalah untuk:
- 1) Mengetahui bagaimana masukan (*inputs*) sumber-sumber dalam rencana yang digunakan.
 - 2) Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi dilaksanakan.
 - 3) Apakah rentan waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak.

³²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Februari 2014), hlm.. 94.

³³ *Ibid.*, hlm. 118-119

- 4) Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.³⁴

Sedangkan adapun hambatan-hambatan yang dialami difabel baik dari mulai aksesibilitas hingga partisipasi masyarakat difabel dalam konsep pembangunan masyarakat menurut Inge Komardjaja sebagai berikut:³⁵

a. Masalah Statistik tentang Penyandang Disabilitas

Data penyandang difabel akan lengkap jika tersedia informasi statistik tentang penyandang disabilitas dari pusat pemerintahan. Namun informasi khusus ini sangat kurang, seperti jumlah para penyandang disabilitas di Indonesia, pola pekerjaan, tingkat pendidikan, dan model transportasi yang tersedia. dari organisasi kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa sepuluh persen dari penduduk Indonesia menyandang difabel.

b. Model Medis yang Menjadi Model Disabilitas

Model medis memandang disabilitas sebagai masalah kebutuhan perorangan, yang secara langsung disebabkan oleh satu penyakit atau kondisi-kondisi kesehatan lainnya. Untuk kesejahteraannya orang tersebut membutuhkan pengobatan medis dan perawatan perorangan oleh para profesional. Dengan perspektif ini, kesejahteraan penyandang disabilitas menjadi fokus kepedulian, pemerintah dan lembaga swasta wajib untuk memberikan berbagai hal untuk kesejahteraan mereka.

³⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm. 118.

³⁵ Caritas, *A Bridge Over Trouble Water*, (Karitas: 2010), hlm. 78-87.

c. Kekuatan Model Soisal dalam Memandang Disabilitas

Model sosial tentang disabilitas memandang disabilitas sebagai satu masalah yang diciptakan oleh lingkungan sosial. Model ini menghimbau agar para penyandang disabilitas terintegrasi secara penuh ke dalam masyarakat. Dalam model ini disabilitas bukanlah ciri seseorang namun satu masalah tercipta karena lingkungan sosial, masyarakat dan budaya khusus dimana mereka tinggal bertanggungjawab karena menciptakan hambatan fisik dan sosial yang dihadapi penyandang disabilitas.

d. Rancangan dan Mobilitas yang Tidak Mendukung

Banyak ahli geografi perkotaan dari Barat yang berpengaruh seperti Gleeson yakin bahwa lingkungan hanya semata dibangun untuk para penghuni yang tidak menyandang cacat dan dalam kenyataan lingkungan terbangun seperti itu mendiskriminasikan para penyandang disabilitas. Banyak yang bisa diamati di prasarana kota seperti pemukiman jalan, trotoar dan ruang publik, arsitektur bangunan, transportasi umum masih banyak yang belum menggunakan layanan yang aksesibel untuk semua berbagai masyarakat. Karena seharusnya lingkungan untuk semua orang dengan semua kemampuan dan usia dan menghindari halangan yang tidak perlu.³⁶

³⁶ *Ibid.*, 85.

H. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga SIGAB Jl. Wonosari km.8 Berbah Sleman, yang memiliki program perintisan Desa Inklusi di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu:

- a. Lembaga SIGAB memiliki program salah satunya adalah rintisan desa inklusi yaitu di desa Sendangadi Sleman.
- b. Lembaga SIGAB merupakan lembaga yang memperjuangkan hak-hak para difabel dan mengadvokasi isu-isu difabel dalam rangka membangun awareness dan maenstriming difabilitas.
- c. Pendampingan lembaga SIGAB sangat memiliki dampak baik kedepan dengan adanya program rintisan desa inklusi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang advokasi Lembaga SIGAB dalam Mewujudkan Desa Inklusi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Strauss dalam buku Rulam Ahmadi mengemukakan alasan seseorang melakukan penelitian kualitatif diantaranya keyakinan peneliti berdasarkan pengalaman penelitian yang pernah dilakukan dalam mengumpulkan dan menganalisis data ternyata telah memberikan hasil yang memuaskan. Alasan lain adalah sifat masalah penelitian dengan beberapa kawasan studi secara alamiah lebih mengarah pada tipe-tipe penelitian kualitatif. Metode penelitian

kualitatif lebih dapat memberikan secara detail fenomena yang ruwet sulit untuk disampaikan dengan metode kuantitatif.³⁷

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena lebih mudah dalam memperoleh data-data untuk menjawab permasalahan penelitian dan pendekatan ini lebih mampu dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁸ Jadi subyek penelitian adalah orang yang cukup lama mengikuti kegiatan yang sedang diteliti, terlibat penuh dalam kegiatan yang sedang diteliti dan memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.

Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka subyek dalam penelitian ini adalah koordinator program RINDI, para karyawan atau relawan SIGAB, dan masyarakat pendampingan rintisan Desa inklusi di Sendangadi Sleman D. I. Yogyakarta.

4. Penentuan Informan

Dalam pengambilan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan cara penarikan sample untuk tujuan khusus yaitu situasi. Untuk memilih informan yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian dan mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang sesuai dengan

³⁷Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 12.

³⁸Tatang m.Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 92.

penelitian.³⁹ Teknik yang digunakan adalah teknik berdasarkan kriteria. Penentuan informan berdasarkan kriteria digunakan untuk menentukan informan yang sudah memahami dan mengetahui serta terlibat dalam program RINDI. Dari kriteria diatas maka ditentukan informan sebagai berikut adalah diantaranya:

- a. Pak Rohmanu, selaku Koordinasi Advokasi dan Desa Inklusi.
- b. Mb Kuni, selaku wakil Koordinasi Advokasi dan Desa Inklusi.
- c. Mas Aji, selaku Kontribusi Website Solider SIGAB.
- d. Mas Dody, selaku ketua ODDS dan penyandang difabel daksa yang bermukim asli di Desa Sendangadi.
- e. Ibu Repini, selaku masyarakat Desa Sendangadi penyandang difabel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara (*interview*), teknik pengamatan (*observation*), dan teknik dokumentasi. Dalam teknik wawancara, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan terlebih dahulu dan berharap informan menjawab pertanyaan tersebut dalam hal-hal kerangka wawancara.⁴⁰ Jadi sebelum melakukan pengambilan data, penulis membuat pedoman wawancara terlebih dahulu.

³⁹ W Laurence Neuman, *Social Research Methods and Quantitative Approaches*, (Boston: Allyn & Balcin, 2000), hlm. 198.

⁴⁰ M. Junaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 178.

Selanjutnya yaitu menggunakan teknik pengamatan (*observation*), teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengamati secara langsung dengan teliti yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi. Terakhir adalah menggunakan teknik dokumentasi, teknik dokumentasi adalah teknik dalam pengumpulan berbagai arsip, dokumen, atau piagam-piagam terkait dengan permasalahan penelitian yang ada pada lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian peneliti. Dengan adanya dokumen-dokumen dan arsip maka dapat memperkuat informasi awal.⁴¹ Teknik ini juga digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh oleh kedua teknik sebelumnya.

6. Teknik Validitas Data

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini akan menjamin penelitian ini lebih akurat, karena informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu atau proses.⁴² Triangulasi juga merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data yang didapat untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang didapat.⁴³

⁴¹Andi, Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hlm. 106-107.

⁴²Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 82.

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 330.

Terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Denzin dalam bukunya Moleong, yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori. Dari keempat macam triangulasi tersebut peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁴⁴ Triangulasi sumber juga merupakan teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapat melalui beberapa sumber.⁴⁵

Oleh karena itu, supaya penelitian ini tidak diragukan kebenarannya, maka perlu dilakukan pemakaian teknik triangulasi sebagai alat untuk bisa mengetahui keabsahan penelitian ini. Jadi, dari data atau informasi yang didapat dari satu sumber supaya dapat melihat kredibilitasnya adalah dengan mencocokkan data atau informasi tersebut ke sumber-sumber yang lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu urutan dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.⁴⁶

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, hlm 330-331.

⁴⁵Andi, Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hlm.269.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, hlm. 280.

Sehingga data yang telah didapatkan perlu untuk diurutkan supaya dapat mempermudah dalam mengorganisasikannya ke dalam kategori. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁴⁷

Model analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan model analisis interaktif. Dalam analisis interaktif terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan⁴⁸:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan membaca kesimpulan.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 247.

⁴⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 209-210.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang berhubungan dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, mengelompokkan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yang didalamnya terdapat sub-sub seperti berikut:

- Bab I : Pendahuluan yaitu meliputi pembahasan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
- Bab II : Membahas mengenai gambaran umum dari Lembaga SIGAB Sleman yang mencakup keadaan lokasi baik mengenai letak geografis, kondisi sosial masyarakatnya dan meenjelaskan tentang pelaksanaan program desa inklusi.
- Bab III : Pada bab ini penulis membahas tentang advokasi perintisan desa inklusi di Desa Sendangadi Sleman oleh lembaga SIGAB.
- Bab IV : bab ini adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan penelusuran yang dilakukan, berikut ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Indonesia dalam inklusi adalah gagasan yang dibuat oleh SIGAB yang diawali dari ranah Desa yang memiliki hierarki terkecil dalam pemerintahan, dengan melakukan pengorganisasian kelompok difabel. RINDI (Rintisan Desa Inklusi) sebutan program yang di rintis oleh SIGAB di delapan Desa ada dua di Kabupaten Sleman yaitu Sendangtirto, Kecamatan Berbah serta Sendangadi, Kecamatan Mlati. Adapun enam Desa yang lain adalah Desa Sidorejo, Gulurejo, Jatirejo, Ngentakrejo, Bumirejo, dan Wahyuharjo, semuanya di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo.
2. Upaya advokasi dalam mewujudkan Desa inklusi yaitu 1) Desa memiliki data terpilah yang menggambarkan bukan hanya kondisi sosial ekonomi, termasuk data difabel; 2) Adanya wadah untuk kelompok / warga difabel di desa; 3) Forum warga bersifat inklusif; melibatkan keterwakilan berbagai kelompok termasuk masyarakat yang selama ini terpinggirkan – difabel; 4) Penyelenggaraan layanan dasar ramah difabel; 5) Difabel terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan MUSRENBANGDES; 6) Adanya regulasi di tingkat desa yang menjadi payung hukum desa inklusi; 7) Sarana dan prasarana layanan publik di tingkat desa ramah difabel (aksesibel

dan terjangkau); 8) Adanya tanggungjawab masyarakat untuk turut melindungi hak difabel. Tetapi diantara 8 upaya Desa inklusi tersebut blum terlaksana seutuhnya maksimal karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

3. Dalam melakukan advokasi sosial seperti mewujudkan Desa inklusi ini SIGAB ataupun dari Desa Sendangadi sendiri mengalami hambatan dan tantangan yaitu kurangnya dukungan secara maksimal, mobilisasi, kurangnya memaksimalkan situs Desa (SID), lemahnya kebijakan PerDes, perbaikan ekonomi masyarakat, monitoring dan evalusai program. Dari beberapa hambatan dan tantangan tersebut menjadi tantangan kedepannya untuk SIGAB dan menjadi perbaikan bagi pemerintah Desa ataupun pusat untuk menangani permasalahan dan mencari solusinya.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan Pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah:

1. Kepada Lembaga SIGAB
 - a. Selalu update isu-isu difabel yang telah diberdayakan oleh lembaga.
 - b. Selalu memonitoring Desa Inklusi yang telah dirintis jangan langsung dilepas tanpa adanya monev.
 - c. Membuat program program menarik untuk mendorong keaktifan para difabel di daerah Yogyakarta ini terkhusus.

2. Kelompok Difabel Desa Sendangadi

- a. Pelaksanaan organisasi difabel Desa ini sebaiknya dilengkapi dengan administrasi untuk memperkuat sebuah organisasi atau kelompok.
- b. Perlu adanya evaluasi secara teratur supaya anggota ODDS yang lainnya ikut aktif.
- c. Buatlah program-program untuk difabel karena ini merupakan potensi yang jarang dimiliki oleh setiap daerah, manfaatkan potensi yang ada dan bekerjasama dengan pihak pemerintah Desa Sendangadi.

3. Pemerintahan Desa Sendangadi

- a. Memberikan anggaran langsung dan yang mengelola organisasi difabel Desa Sendangadi (ODDS) sendiri.
- b. Memberikan sarana prasarana atau aksesibel tidak hanya di kantor pelayanan Desa tetapi meliputi tempat-tempat umum lainnya seperti masjid, puskesmas, sekolah-sekolah.
- c. Mendukung secara maksimal ODDS baik melalui kebijakan (PerDes) hingga aksesibel pelayanan untuk para difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016
- Ahyudi Wira Harahap, *Upaya Yayasan Pusat Terapi Permata Ananda Yogyakarta dalam Meningkatkan Interaksi Sosial Anak Auti*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2016.
- Ayu Ratri Maulidia “*Advokasi Terhadap Difabel Kekerasan Seksual oleh Lembaga SIGAB*”, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).
- Chahaya Khaeroni “*Konsep Ekofeminisme Vandana Shiva dan Implikasinya pada Pengembangan Paradigma Pendidikan Agama Islam Inklusi Gender*”. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- David J. Smith, *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*. (Bandung: Penerbit Nuansa).
- Dokumen dari *Lembaga Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)*, tanggal 20 Mei 2016.
- Ezmir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali, 2010).
- Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Univ. Press, 1995).
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: penerbit Sinar Grafika, 2012.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Junaidi M. Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012).

Pamungkas Sigit, *Advokasi Berbasis Jaringan*, Yogyakarta: Gd PAU UGM Lt. 3 Sayap Timur, Agustus 2010.

Panggabean, *Managemen Advokasi*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Pasal 19 ayat 1 dan 2.

Rosyidi Imam, *Pendidikan Berparadigma Inklusi*, UIN Malang Press, 2009.

Rof'ah, *Inklusi Pada Pendidikan Tinggi: Best Practicies Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif bagi Mahasiswa Netra*, (Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel, 2010).

Sinaga Harlen, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Suharto Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2010.

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama, Februari 2014.

Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Pustakan Pelajar Offset, cetakan vi, April 2010).

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Difabel.

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Website:

<http://sigab.or.id/id/article/profil-lembaga-sigab> diakses tgl 05 April .

<http://kbbi.web.id/advokasi>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017.

<http://www.sigab.or.id/id/article/profil-lembaga-sigab>. Diakses tgl 30 Maret 2016.

[https://www.academia.edu/9484915/Langkah-Langkah dalam Kegiatan Pemberdayaan](https://www.academia.edu/9484915/Langkah-Langkah_dalam_Kegiatan_Pemberdayaan). Diakses tgl 05 April 2016.

Wawancara:

Wawancara dengan Irwan Ardian sebagai fasilitator pelatihan pada Rintisan Desa Inklusi, tanggal 20 Mei 2016.

Wawancara dengan Irma, Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 30 November 2016.

Wawancara dengan Prima, Mahasiwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 30 November 2016.

Wawancara dengan bu Brita Putri Utami sebagai koor data dan informasi Lembaga SIGAB Yogyakarta, tanggal 20 Mei 2016.

Wawancara dengan Aji, Kontributor Website Solider SIGAB), Pada tanggal 15 Desember 2016.

Wawancara pak Daman, Kepala Desa “Desa Sendangadi, pada 09 April 2017.

Wawancara mas Dody (Difabel Daksa/Polio), Ketua Organisasi Difabel Desa Sendangadi (ODDS), pada 09 April 2017.

Wawancara ibu Repini, masyarakat Difabel Daksa Desa Sendangadi, pada 30 Maret 2017

Wawancara dengan Pak Rohmanu, Koordinator Advokasi dan Desa Inklusi, pada 04 April 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1: Rembung SIGAB memiliki gambaran awal Desa Inklusi

Gambar 2: Sosialisasi Desa Sendangadi tentang anggaran



Gambar 3: Launching dan Diskusi SID bersama
SIGAB dan masyarakat Desa Sendangadi



Gambar 4: Sosialisasi perspektif difabel bersama tokoh perangkat Desa



Gambar 5: Penulis bersama Ketua Kelompok Difabel Desa Sendangadi (KDDS)



Gambar 6: Tampilan depan dan samping layanan ruang publik yang sudah memenuhi syarat aksesibilitas difabel

Transkrip Wawancara

Pak Rohmanu sebagai Koordinasi Advokasi dan Difabel

1. Asal usul adanya Desa Inklusi?

Sebenarnya kan gagasan Desa Inklusi itu kan diawali dari dulukan sebelum ada program ini bersama Asia Foundation. Dulu Sigab pernah membuat *pilot project* untuk awal-awal cuma 6 bulan itu di Sendangadi, Kulon Progo dan Bantul tahun 2013 dulu mas Dody yang sebagai managernya. Dari situ trus rangkaian kegiatannya, itu kan gagsan dari SIGAB. Jadi selanjutnya kita tahun 2014 mengadakan temu inklusi untuk mengerucutkan bagaimana gagasan Desa Inklusi. Kita berpandangan bahwasanya difabel itu banyaak yang bertempat di Desa dari pada di Kota. Hasil sensus itu seperti itu. Lah pada temu inklusi itu kita merumuskan tentang bagaimana apa itu Desa Inklusi. Jadi melalui worksop--worksop itu sendiri.kita mengajak beberapa kawan tidak hanya SIGAB saja dengan beberapa elemen, dengan berbagai profesi untuk merusmuskan pertemuan itu.

2. Bagaimana yang disebut Desa Inklusi itu sseperti apa?

Dengan beberapa temen2 diajak berfikir pertama dengan maket harus ada apa sih misalnya. Iya kalau sekolah harus ramah difabel, gedung harus difabel, layanan kesehatan, penganggaran Desa, perangkat Desa, masyarakat juga ramah difabel iya itu sih semuanya terlibat disitu inklusif itu. Itu mulainya melalui workshop. Trus tahun 2014 baru gagasan itu di implementasikan lagi dalam Desa yang lebih banyak dan lebih panjang. Jadi salah satu ada tujuh indikator sbenernya tiga diantaranya yaitu satu data difabel Desa, organisasi Desa, partisipasi Desa sama penganggaran difabel. Jdi harus ada 7 indikator ini yang disebut Desa Inklusi. Selama ini dari apa yang kita lakukan di Desa menurut penilaian dari 7 itu belum Pemilihan Desa lebih kepada bahwa di Sendangadi minimal sudah ada embrio organisasi difabel sudah ada mas Dody mb Ratna dan kawan-kawannya. Disana kan memang sudah ada organisasi kecil yang ada di Desa. Kalau yang di Sendangtirta ini kan soalnya kantornya kita disini. Dulu pernah dirintis tahun 2013 selama 6 bulan kita lebih melanjutkan. Kalau dulu kan istilahnya lebih membangun perspektif ditingkat perangkat yang sekarang ini lebih ke masyarakat.

3. Capaian kegiatan?

jadi rangkaian kegiatan utnutr Desa Inklusi salah satunya pertama Sleman itu kan sudah ada MOU antara SIGAB dengan pemerintah kabupaten terkait rangkaian kegiatan. Memulai dengan adanya MOU, sosialisasi untuk perencanaan bersama dengan pemerintah Desa di Mlati, sosialisasi trus proses pembentukan kelompok difabel Desa, membangun perspektif tentang aksesibilitas.

Sebenarnya dari 7 indikator itu ini belum bagaimana sebuah Desa sudah dikatakan Desa Inklusi. Karena dari 7 indikator ini sebenarnya masih

belum karena belum ada regulasi (terus menerus berkelanjutan) atau kebijakan Desa yang memang punya keberpihakan misalnya Perdes atau apa di tingkat Desa. (pelembagaan di Desa). Desa sudah memberi alokasi anggaran trus mebangun aksesibilitas itu sudah itu Cuma pencapaian. Tapi ya maksudnya tidak hanya disaat itu, kalau regulasinya kan terus menerus, minimal satu tahun ini perkembangannya pertahun 10% tahun kedua 20% dan seterusnya. Dana umum di Sendangadi kan akhirnya akses semua baik di Puskesmas, tempat ibadah, layanan pemerintahan. Kalau di Sendangadi layanan umum sudah akses.

4. Pasca program RINDI selesai?

langsung diteruskan oleh Desanya Organisasi Difabel Desa Sendangadi (ODDS) itu sendiri. Pembiayaan2 pertemuan2 itu sudah dibiayaan sama Desa. Itu kan salah satu keberhasilan program ini difabel Desa Monitoring dari kegiatan-kegiatannya. Kalau pasca program ini kita karena sudah tidak ada ikatan apa-apa, iya secara mandiri dia akan berproses sendiri memang punya inisiatif.

5. Hambatan dan tantangan?

Tingkat kehadiran difabel itu tidak semua bisa hadir karena mobilitas, trus tingkat pendidikan, dan hambatan yang lain ada juga difabel berharap bahwa dari kalau ada kumpul2 akan dapat bantuan termasuk menghambat juga. Tapi kalau sekarang ini tidak signifikan, karena Desa sudah mengalokasikan dalam bentuk pelatihan2 dan kegiatan2 yang didanai oleh Desa Apebedes.

Membangun perspektif kalau ditingkat masyarakat belum terbangun iya makanya akhirnya masih muncul stigma itu difabel kurang mampu difabel dll.

Mb Kuni sebagai wakil Koordinator Advokasi dan Difabel

1. Siapa yang melakukan proses penyadaran tersebut?

Dari pihak sigab (pendamping) dengan masyrkat difabel Desa kemudian bekerjasama dengan tokoh2 masyarakat disana dan pihak Desa agar bersinergi bersama.

2. Apasaja upaya advokasi yang dilakukan selama perintisan di Desa-Desa yang telah terpilih untuk dijadikan Desa Inklusi?

Secara global awalnya tentu memberikan perspektif difabel dulu pihak desa dan pihak difabel juga kmudian diundang dan untuk membentuk kelompok difabel disana. Disadarkan bahwa kelompok difabel dibutuhkan sebagai wadah untuk bisa menampung semua aspirasinya, dan kenapa dibentuk kelompok difabel karena harapane, jadi di Desa kan ada lembaga2 yang diampu oleh Desa semacam karangtaruna, pkk, apmd, lembaga2 itu kan memang mereka sudah ada kemudian difabel berharap setara dengan mereka maka dibentuk kelompok

difabel yang diakui oleh Desa. Kelompok difabel yang diakui ini punya hak yang sama dengan lembaga yang lain tadi tujuannya. Kenapa ketika punya hak yang sama dia akan punya hak untuk ikut MUSREMBANG. Dari Desa itu memunculkan SK kepada kelompok difabel itu bahwa disana sudah diakui keberadaan kelompok difabel Desa bagian dari Desa, yang notabennya jika sudah begitu difabel punya hak ketika nanti MUSREMBANGDES dia jga harus ikut andil disana bisa ikut memprogramkan apa yang menjadi kebutuhannya tapi yang harus dicermati bahwa program RINDI itu tidak untuk mengarah ke ceritya (pembagian bantuan) tetapi mengarah bagaimana temen2 difabel itu bisa mandiri. Advokasi, ada kegiatan ikut masuk disana, misalnya kumpulan ibu2 pkk, posyandu mereka ikut andil disana segala kegiatan yang ada di Desa, termasuk bapak2 itu tidak mendiskreditkan difabel lagi disana. Intinya kan difabel mempunyai hak yang sama setara lah. Skarang juga sudah ada perda diy. Maka dibentuk kelompok difabel Desa ketika wes dibentuk kelompok difabel Desa bagaimana bersinergi dengan perangkat Desa. Difabel semua umur ikut andil dan tidak semua difabel aktif bisa didampingi orang tua. Karena tidak semua difabel aktif karena ada yang difabel mental, dan memberikan perspektif kepada orangtua bagaimana difabel itu.

Mas Dody (Difabel Daksa) sebagai ketua Organisasi Difabel Desa Sendangadi (ODDS)

1. Bagaimana sejarah Desa Inklusi di Desa Sendangadi?

>>Mulainya itu sebelum, jadi di tahun 2013 kita sudah mulai mencoba membangun Desa Inklusi di 3 Desa yg pertama di Desa Sendangadi Mlati Sleman, Lendah Kulonprogo dan Sendangrejo Bantul, program singkat sama SIGAB dan temen-temen berproses kemudian tahun 2013 itu mendorong Inklusi di Desa. Kegiatannya saat itu ya ada diskusi umum terus diskusi dengan perangkat Desanya untuk difabelnya, pada saat itu pelatihan *publik speaking* berani berbicara didepan umum selama 4 bulanan. Kemudian SIGAB mengonsep ini menjadi RINDI dan di sokong oleh program peduli punya PMK dimulai tahun 2015 program ini selama 18 bulan dengan judul Rintisan Desa Inklusi (RINDI) Selemam 2 Desa Kulon progo 8 Desa, selama 18 bulan itu kita berproses.

2. Apa saja tujuan diadakannya rintisan Desa Inklusi?

>>Bagaimana pemerintah Desa dalam pembangunan Desa mempunyai prinsip Inklusi.
Mendorong pemerintah Desa, mendorong temen2 difabelnya untuk bisa meneruskan program ini.

3. Apa prinsip yang dijadikan pedoman dalam RINDI?

>>Bahwa dalam Inklusi ada partisipasi difabel, ada keterbukaan difabel Desa. Desa mulai mengaggap warga difabel bagian dari keutuhan masyarakat. Prinsip aksesibilitas

4. Mengapa gagasan inklusi di mulai dari Desa?

>>Karena di Desa itu ternyata banyak temen2 difabel tinggal disana. Untuk Mlati saja ya misalnya itu di Desa Sendangadi datanya mencapai 156, Sinduadi sebelah selatan itu 163, total satu kecamatan Mlati sekitar 800an makanya gagasan inklusi dimulai dari Desa.

5. Apa atau kapan kriteria Desa disebut Desa Inklusi?

>>ketika prinsip2 tadi sudah dijalankan sudah ditegakkan sudah mulai melibatkan difabel dalam proses pembangunan, sudah memfasilitasi ruang2 publik atau bangunan perintah desa sudah aksesibel. Kemudian kebutuhan difabel sudah dipenuhi dalam anggaran Desa itu misalnya. Bagaimana Desa menyertakan konsep pembangunan difabel didalam konsep pembangunan masyarakat. Jadi ketika Desa berpikir tentang membangun gedung pelayanan publik balai misalnya mereka berpikir bahwa gedung ini nanti bisa diakses salah satu difabel misalnya.

6. Apa saja proses yang dilakukan dalam program RINDI di setiap Desa terutama di Desa Sendangadi sendiri?

Kita mulai dari awal sosialisasi, mulai diskusi2 di perangkat Desa dengan pak dukuh, kemudian kita menguatkan organisasi difabel desanya, mengadakan pertemuan, terus kemudian menguatkan dengan surat keputusan kepala Desa bahwa disitu ada organisasi difabel Desanya, mengadvokasi agar organisasi difabel Desa ini dapat anggaran desa dari pemerintah Desa, terus kemudian juga ada pelatiha2 dan pendidikan2 seperti pendidikan kespro, aksesibilitas, manajemen keorganisasian pelatihan tentang perspektif disabilitas dan inklus, bertanam pelatihan polibek, jadi ada satu sisi penguatan difabel di skill life. Penataan difabel membangun SID, melakukan komunikasi2 dengan stakeholder Desa

7. Apa saja yang ingin dicapai Desa Inklusi?

Sebenarnya kalau mengacu ke tujuan pencapaiannya itu yang pertama Desa mulai mendukung (pemerintah sampai Kabupaten) mendukung program RINDI ini dukungannya ini bisa lewat kebijakan bisa lewat anggaran. Kedua temen2 difabel itu mampu berpartisipasi atau rembug di Desa kan sudah diajak MUSRENBANG diundang ya dalam musyawarah Rencana Pembangunan Desa jadi sudah istilahnya kapasitas untuk menyampaikan kebutuhan atau usulan difabel udah cukuplah tinggal nanti dikuatkan didepannya. Terus kemudian Desa istilahnya itu mensupport program inklusi ini kalau tadi mendukung , kalau yang ini lebih kewujud nyatanya. Jadi misalnya kalau di Sendangadi kan sekarang sudah ada pembangunan RAM bidang miring, kalau jenengan tengok kan gedung pelayanan umum sudah ada. Itu rencana Sendangadi itu bangunan tengah

mau dirombak. Pak Kadesnya sudah berjanji mau membangun sekretariat untuk difabel Sendangadi artinya kan Desa sudah ada dukunganlah seperti itulah modelnya. Terus selanjutnya capaian terakhir ada Replikasi/ bisa ditularkan di Desa lain bisa jadi contoh di Desa lain. Di Mlati itu, terus kemudian di Desa Tirtoadi sudah membentuk organisasi difabel Desa, dan sudah ada anggaran Desa walaupun belum banyak tapi sudah ada untuk kegiatan. Di Desa Sinduadi sudah membentuk organisasi desa atau kelompok difabel Desa kalau di RINDI. Disana juga pemerintah Desa sudah mengucurkan dana kalau nggak salah 6.5jt untuk mendukung rapat bulanan dsb. Kemudian dua Desa lagi rencana dalam tahun ini akan membentuk organisasi Desa atau kelompok difabel Desa. Sumberadi pemerintah Desanya sudah siap tapi cuma waktunya belum ada. Kalau Tlogoadi temen-temen sudah siap tapi cuma pemerintah Desanya masih perlu untuk komunikasi lagi lanjut, tapi 80% sudah siaplah. Jadi harapannya tahun 2017 dua Desa ini akan punya organisasi Desa lengkaplah jadi 5 Desa ada organisasi Desanya, dan mereka punya kegiatan sendiri-sendiri nanti kita yang organisasi di tingkat kecamatan mengorganisasikan kegiatan ini kan nanti mereka akan yang selalu berkomunikasi dengan Desa, yang memberikan kebutuhan2 temen2 difabel juga masing2, megorganisir acara2, mungkin ada kegiatan diskusi di Desa. Kemarin di MUSREMBANG ada Desa Sendangadi, Desa Sinduadi dsb sudah diundang perwakilan organisasi Desanya dan mereka sudah berbicara disana itu artinya sudah ada perkembangan yang cukup bagus di beberapa Desa sudah mulai melibatkan di MUSREMBANGDES.

8. Bagaimana keterlibatan anda untuk mewujudkan Desa Inklusi?

Kalau saya kan jadi fasilitator Desa jadi keterlibatan saya ya berkomunikasi dengan pemerintah Desa, dengan BPD, dengan pengurus organisasi difabel Desanya, dan berkomunikasi dengan sigab untuk mengonsep kegiatan apa sih yang sekiranya diperlukan di Desa Sendangadi, dengan lembaga2 desa yang lain misalnya pkk karangtaruna apmd. Itu dalam rangka mengkomunikasikan sama mengonsep kegiatan tadi dan dampaknya.

9. Bagaimana masyarakat disabilitas merespon adanya program RINDI ini?

Itu sangat bagus responnya beberapa temen ikut partisipasi di kegiatan2 yang inklusi misalnya di tahun 2015 kan ada hari ulang tahun Desa ini. kita diundang temen2 difabel ikut terlibat disitu beberapa ada yang jadi panitia juga, ikut terlibat dalam rangkaian acara. Kemudian beberapa juga ikut didalam proses2 seperti itu membangun Sistem Informasi Desa (SID). #Kalau grahita kan kalau mereka kan hambatan dengan intelektual psikososial, mereka kita undang selain grahitanya juga orang tua yang dampingi agar ikut partisipasi dalam menguatkan organisasi, mereka bisa masuk jadi pengurus atau membantu dalam kegiatan. Tapi kalau anaknya ya kita usahakan supaya ikut juga karena nanti kita berpikir siapa tahu

nanti ada program yang bisa menasar pada teman2 grahita. Makanya sedang kita pikirkan. Memang dari data yang kemarin baru melakukan pemetaan yang grahita berapa daksa berapa netra berapa. Nanti kita konsep yang grahita kira2 kebutuhannya apa, trus kalau dia mampu untuk kerja trus kerjanya apa, dan yang kita pikirkan kedepannya. Sebab paling tidak mereka punya ini pertama punya kemandirian didalam diri sendiri, kemandirian ekonominya atau paling tidak peningkatan dalam ekonomi. ini banyak usulan dari orang tua dengan anak grahita itu trus mengusulkan kegiatan yang istilahnya ada hasilnya trus hasilnya bisa dijual, itu ya nanti jualannya bisa istilahnya nambah ekonomi mereka. Memang itu belum dilakukan tapi kita sudah nangkap sebelum2 itu. Memang kebanyakan teman2 difabel kebanyakan tidak bekerja walaupun bekerja mereka wirausaha sendiri, jadi jarang yang bekerja di perusahaan pegawai negeri atau di instansi2.

10. Hambatan dan tantangan apa saja yang dialami selama memulai perintisan hingga sekarang?

>>HAMBATAN. 1) Perspektif inklusinya itu mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi masih gini Pemerintas Desa itu masih gk tau karna dasar apa namanya didalam anggarannya, karna dasar pembagian presentasi misalnya yang untuk anggaran untuk ke fisik berapa persen yang non-fisik berapa persen, trus kemudian untuk penyandang disabilitasnya berapa persen dan yang lain berapa persen ini gk tau ngambil dasar pemikirannya apa sehingga istilahnya belum diberi kewenangan penganggaran lebih yang seperti yang kita inginkan gitu. Jadi nek kita sih harapannya kebutuhan yang kita masukkan trus bisa dianggarkan dari anggaran Desa nanti kita sendiri yang mengelola gitu untuk pertanggungjawabannya tinggal sesuai dengan data. Tapi sekarang itu masih Desa masih duitnya dari sana jadi kalau organisasi ada kegiatan ya disampaikan dulu ke Desa kegiatannya apa nanti anggarannya baru dari Desa dalam wujud konsumsi misalnya. Jadi ya gitu pengelolaannya masih seperti itu jadi ya belum maksimal lah program yang kita usulkan tapi diawal2 mungkin polanya masih seperti itu tapi kita dorong kedepannya ada perubahan

Tantangannya informasi yang seharusnya bisa diakses masyarakat Desa itu masih belum istilahnya belum sepenuhnya dishare di masyarakat, jadi misalnya tentang kebijakan2 Desa nah itu belum dishare ke masyarakat Desa. Misalnya saja mungkin ya kalau di SID kan ada web nya nah itu belum digunakan secara maksimal nah kalau itu digunakan secara maksimal kan misalnya keputusan Desa apa? Itu nanti bisa ditempelkan disitu sehingga masyarakat bisa melihat atau mungkin di madingnya gitu atau di web Desa jadi masyarakat tahu. Jadi masyarakat tahu ohh ini Desa punya keputusan ini tentang apa gitu, termasuk data base RPJBEMDES

Tantangan diorganisasi difabelnya kita masih banyak penguatan kapasitas yang harus dilakukan untuk belajar tentang banyak hal belajar tentang UUDes sistem penganggaran Desa, Timeline kegiatan Musrembang

Pramusreimbang. Karna kan kadang Desa itu tidak preaper bayak hal dadakan gitu. Ngundangnya juga sehari sebelumnya, jadi kita gk siap, kalau kita tahu jadwalkan bisa mempersiapkan.

2) Tantangan bagaimana mempengaruhi lembaga2 di Desa agar punya konsep inklusi termasuk model2 di Desa.misalnya tempat ibadah, Pustu Puskesmas Pembantu, termasuk sekolah2 yang ada di Desa bagaimana mereka bisa punya konsep pendidikan inklusi.

Kalau di Sendangadi kita sudah mencoba membangun setiap dua bulan sekali itu ada forum diskusi pendidikan inklusi Desa Sendangadi. Kita kumpulkan sekolah2 di Sendangadi guru2nya, atau pengajarnya atau stafnya. Kita sama2 belajar tentang difabel,inklusi, bagaimana berinteraksi dengan difabel. Itu jadi agenda rutin dua bulan sekali.

Harapannya punya kedepannya sekolah2 itu nanti istilahnya menerima sudah rela hati menerima difabel. Dalam artian ketika mereka menerima itu ya sistemnya sudah mereka kondisikan, terus guru2 disana sudah *awarre*, temen2 disana juga sudah diberi pengetahuan sehingga tidak ada *bullying*, ketakutan selama ini kan pertama kalau anakku difabel di sekolahkan di sekolah umum takutnya kan di bulying, kedua gurunya jadi gk maksimal mengajarnya, ketiga sarana prasarananya misalnya gedungnya bertingkat2. Ya itu butuh proses panjang.

Di tahun kedua, kita berproses di program ini. Ya di tahun kedua ini ada *action* di tiap sekolah, misalnya kita buat workshop di kelas. Banyak gambaran misalnya nanti kita buat workshop di kelas lima sd, nanti temen2 yang di kelas lima itu bisa jadi kakak yang bisa ngasih nular2 ke adiknya tentang inklusi difabel tentang bagaimana bergaul dengan difabel. Dan juga butuh temen2 relawan dari mahasiswa/wi dan kelompok yang lain untuk bisa terlibat dalam proses2 ini gitu ya gambaran kita untuk kedepannya.

11. Berapa lama program ini dilaksanakan?

18 bulan, insyaAllah nanti kalau dilanjutkan lagi ya kira2 mungkin gk jauh beda lah dari kemarin maksudnya waktunya.

Nanti jika program ini selesai periode desember kesini ya kita sendiri yang akan punya konsep kita sendiri yang memutuskan. Sehingga dulu waktu forum Desa inklusi ini pembiayaannya kan kita ajukan awal2 loh dari program RINDI, tapi terus kemudian saya pikir Desa mampu untuk mendukung pembiayaan ini ya akhirnya trus saya minta ke Desa akhirnya didukung anggaran Desa itu.

Jadi proses forum diskusi forum pendidikan inklusi ini untuk konsumsi makannya dari Desa saat ini. Ya mudah2an nanti trus dari Desa yang pembiayaan kegiatan ini.

Saya sebenarnya masih punya target dua kegiatan lagi di Desa ya mudah2n bisa dibiayai Desa. Nanti biar bisa implementasi UUDes itu bisa terwujud.

Dari SIGAB masih monitoring sekarang bagaimana perkembangan2 dari kegiatan2, data2nya dan kita kan juga ada group wa jadi kegiatan2 bisa di share di group jadi bisa dipantaulah.

12. Seperti apa ukuran keberhasilan program tersebut menurut anda?

Bagaimana kalau Desa sudah mulai mewujudkan aksesibilitasnya, sudah menganggarkan, sudah terlibat di MUSREMBANGDES, terus temen2 difabel sudah mulai banyak melakukan kegiatan advokasi, terus ada replikasi tadi menularkan ilmu ke Desa lain.

Ibu Repini (Difabel Daksa) Masyarakat Disabilitas Desa Sendangadi

1. Apa peran ibu di ODDS?

Iya termasuk kelompok Difabel. Nama ibu Repini kalau umur udah 47 udah tua. Difabel udah sejak lahir iya difabel Daksa tangan ini.

2. Apasaja perubahan-perubahan yang sebelum dan setelah ada Desa Inklusi program RINDI dari SIGAB?

Sebelumnya ya belum setara antara difabel dan non difabel tapi sekarang ya semua setara difabel juga mulai banyak dilibatkan dalam acara-acara Desa kegiatan PKK, ulang tahun kabupaten, kadang diminta pendapatnya. Kalau di Desa ini emang sudah lama setara kalau masalah pendidikan semuanya sudah sekolah dari kecil sampai perguruan tinggi. Pergaulan juga udah biasa antara difabel sama non difabel. Iya udah mulai sering diundang buat ambil keputusan dimintai pendapat. Kemarin ikut acara ulang tahun Desa juga ikut serta.

3. Perekonomian Difabel yang ada di Desa?

Kalau saya dari dulu udah mulai membuat kaya kacang telur trus nanti tetangga-tetangga yang difabel dikasih pelatihan buat itu terus di Pasarin ke warung-warung atau ke Pasar. Ada juga di Rumah saya sendiri buat pelatihan jahit, tapi itu saya lakukan dari keinginan saya sendiri sebelum Desa jadi Desa Inklusi. Iya biar bisa pada mandiri mb. Iya kalau sudah pada bisa semua ada yang buat dirumah masing-masing biar pada mandiri percaya diri. Kalau sekarang iya kerja-kerja udah mulai banyak yang mempekerjakan difabel nggak dibeda-bedain.

4. Apa saja hambatan dan tantangan yang anda alami sebagai masyarakat difabel?

Kalau saya kan nggak bisa naik kendaraan motor tapi sudah dari dulu sekolah udah bisa naik sepeda tapi gara-gara sekolahnya jauh ya pindah yang deket akhirnya asoalnya capek. Kalau memang dulu emang belum ada antara difabel dan tidak kan masih kalau mau cari sekolah kan repot masih dipandang sebelah mata bukan dipandang keahliannya. Kalau mau berpendapat ya susah berontak ya berontak sendiri. Sekarang iya difabel udah mudah pendidikan mau sekolah swasta apa negeri. Semua itu kan

tergantung sama Desa masing-masing. Sekarang juga udah bnyak difabel yang jadi dosen kaya saudara saya di UGM, difabelnya kaki daksa. Akses kalau kaya di Masjid iya belum ada aksesibel kaya ram masih undakan tapi kan cuma pendek nggak tinggi jadi mudah.

Pak Daman sebagai Kepala Desa Sendangadi

1. Bagaimana pendapat anda ketika Desa Sendangadi ini menjadi Desa Inklusi?

Iya kalau saya sangat merespon ya meliat apa yang dilakukan oleh mas Dody dan temen-temen ini saya seneng sekali artinya kita bisa menjembatani, itu adalah sama-sama warga sini yang harus kita jak bareng nyambut gawe sesuai dengan kemampuan masing-masing tapi kalau saya mampu bisa memfasilitasi ya saya fasilitasi iya terang saya sangat respon dan saya siap untuk membantu apa yang dilakukan mas dody dan temen-temannya.

Karena saya merasa bahwa mas dody dan temen2nya adalah bagian dari saya bagian dari pemerintah Desa. Ya memang harus kita ajak bareng nyambut gawe ya memasukan warga kita sesuai dengan kemampuannya yang bisa. Dan saya berusaha untuk membantu yang harus saya bisa bantu apa artinya proposional dan profesional

2. Bagaimana proses Desa Sendangadi menjadi Desa Inklusi?

Itu ya kita tunggu apa yang dimau oleh mas Dody dan teman2nya yang bisa kita lakukan apa ini semua saya respon jadi saya tidak membatasi yg bisa saya lakukan itu apa ya itu kita respon. Iya jadinya kalau ini nanti menjadi makin baik makin maju ya itu harapan kami.

#Respon cepat pemerintah Desa= ketika membuat aksesibilitas di layanan publik itu salah satu bentuk realnya. Dan nanti gini rencana kami ini gedung samping mau dibangun dua lantai untuk lembaga kecuali disabilitas saya berikan dibawah kita buat ruang yang bisa diakses langsung kalau naikkan gk bisa. Itu rencana kami sudah kami gambar jdi disabilitas punya ruang tersendiri untuk akion membantu pemerintah.

3. Apasaja perubahan Desa Sendangadi ini sebelum dan setelah menjadi Desa Inklusi?

Iya perubahan itu sangat jelas sehingga dengan kinerja mas Dody ini yang hubungannya dengan JamKeSus itu kan terrealisir untuk masyarakat.

#jadi kami memasukan data temen-temen difabel Desa Sendangadi bersama Desa trus kemudian direspon dengan Dinas Sosial Sleman trus akhirnya ke Dinas Kesehatan DIY akhirnya beberapa temen di Sendangadi sudah mendapatkan JamKeSus.

4. Apa saja bentuk dorongan atau dukungan dari Desa yang sudah terialisasi dan yang belum terealisasi?

Iya ini kalau dorongan selanjutnya itu ya hubungannya dengan kita memberi support organisasi difabelnya. Mas Dody ini kan aktif sekali dengan mengadakan seminar, workshop, kepada teman-teman. Kami sangat respon dan support kami siap untuk itu dan tidak ada kata tidak karena bagus positif.

5. Apasaja hambatan dan tantangan yang dialami Desa Sendangadi dalam menjadikan Desa sebagai Desa yang Inklusi?

Iya kalau hambatannya iya karena keterbatasan kami ya kadang-kadang kalau kita (Desa) kalau ada menggunakan dana ya masih terhambat jadi kami semua belum bisa mengakses dana dari pemerintah karena belum waktunya ini sehingga kalau ada disabilitas membutuhkan kan jadi terhambat. Iya itu karena keterbatasan aturan dan sebagainya harus patuh iya kadang kalau belum waktunya saya sangat terhambat untuk memberikan respon dan sebagainya iya bagaimanapun kita harus hati-hati. Iya tapi tetap kalau sudah waktunya nanti mudah pada tanggal tertentu ini kan untuk anggaran bulan ini baru bisa turun dan bisa diakses.

6. Apakah sudah ada kebijakan atau perdes tentang Difabel? Jika belum? Kapan rencana akan dibuat perdes tentang difabel?

Sudah ada, jadi nanti kita anggarakan kita programkan. Sudah masuk APEBEDES. Pembuatannya ya baru. Mungkin untuk tahun depan lebih jelas lagi.

7. Apasaja harapan kedepannya anda setelah Desa Sendangadi ini menjadi Desa Inklusi?

Harapan saya ODDS ini maju apalagi punya kreatifitas yang tinggi yang dibutuhkan Desa. Inikan besok tanggal 13 ada lomba Desa dan menampilkan Perkusi dan ini adalah dari anak-anak SLB disabilitas untuk menyambut tim penilai Desa. Selain itu ada Bergodo milik Desa untuk mengarahkan tim penilai ke Desa. Kemudian disambut oleh tarian dan senam lansia.

#Respon pemerintah desa memang lebih cepat untuk kita merasa perlu kebutuhan aksesibilitas. Kalau jenengan melihat kedalam (kantor pelayanan) ada meja pendek itu sebenarnya untuk teman2 dengan kursi roda sangat nyaman kalau mejanya tinggi kan kurang nyaman itu juga belum banyak dilakukan di Desa2 lain. Terus penganggaran dari Desa juga sudah realisasi ke kita kegiatan-kegiatan kita di Desa juga cukup ada tinggal nanti kedepannya bisa meningkatkan komunikasi dan sinergitas untuk membangun Desa Sendangadi.

Beberapa mahasiswa penyandang Difabel

#Tentang UUDes? kalau di daerah ku nggak terlalu ikut andil soalnya tempatku difabelnya dikit jadi nggak terlalu berpengaruh.

#Tentang adanya UU Disabilitas dan UU Difabilitas

-Apakah mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan?

Awalnya sih iya tapi lama kelamaan mulai terbiasa ama lingkungan kan memang dari kecil orangtua sudah kasih pengertian dan bimbingan biar bisa berinteraksi ama lingkungan sekitar.

Kalau ikut acara-acara remaja dulu sih pernah tapi lama-kelamaan mulai ada kebosanan nggak nyaman aja mungkin dari orang-orangnya nggak terlalu produktif gitu makanya aku sekarang lebih milih ikut yang pengajian bapak-bapak biasanya.

Ada juga difabel di Daerahku tapi itu udah umur 35 tahunan tapi ya kurang terlalu berperan dalam pembangunan di masyarakat soalnya dia kan Grahita jadi ya agak susah dalam berinteraksi ama lingkungan. Kalau yang penyandang tunanetra iya biasa baru beberapa aja nggak terlalu ikut andil.

-Gimana tanggapan anda setelah ada UU Penyandang Difabel?

Dalam hal pemenuhan hak pendidikan setelah adanya UU ini ya lumayan baru beberapa sekolah-sekolah swasta mulai ada yang mengakui atau menghargai para difabel jadi ya mulai bisa masuk di sekolah swasta, tapi ya yang diterima ya cuma baru 2% untuk para difabel.

Sebenarnya kita (Difabilitas) memang banyak menuntut fasilitas dan prasarana ini itu tapi kebanyakan nggak ikut berperan paling Cuma beberapa aja. Kadang kita sebagai para difabel menjadi terlena ada sarana prasarana.

#Apa yang anda ketahui tentang isu Desa Inklusi

Sudah ada 8 Desa yang udah di desain untuk menjadi rintisan desa inklusi.

Selama perintisannya ada program dampingan untuk pembentukan kelompok difabel desa

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Dzurrotun Afifah Fauziah

TTL : Sleman, 13 Desember 1994

Alamat Asal : Dusun Blimbingan, Kelurahan Tambakrejo
Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Profinsi
Yogyakarta, 55552

Email : afifahfauziah9@gmail.com

No.Hp : 082227157379

Alamat di Jogja : Jl. KH. Ali Maksum, PP Krapyak, Komplek
Hindun Anisah, Panggungharjo, Sewon, Bantul,
Yogyakarta, 55011.

Fak/ Jurusan : Fakultas Dakwah dan Komunikasi/ Jurusan
Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Al Husain Salam Magelang
2. Mts Ali Maksum Yogyakarta
3. MA Ali Maksum Yogyakarta
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dzurrotun Afifah Fauziah
NIM: 13230004